

PEMIKIRAN S.M. KARTOSOEWIRJO TENTANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Akbarudin AM

Organisasi Pemuda Pancasila Yogyakarta

Abstrak: Menurut S.M Kartosoewirjo negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam namun tidak menganut paham yang berdasarkan Islam. Justru langkah yang diambil oleh para founding father's, khususnya kaum nasionalis sekuler lebih memilih Ideologi Pancasila. Yang sampai saat ini eksistensinya masih dipertanyakan bahkan terkesan ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan alasan penolakan S.M Kartosoewirjo terhadap negara Republik Indonesia adalah Ideologi Islam yang lebih sempurna, pemikiran S.M Kartosoewirjo anti Kolonialisme Barat karena menurutnya sangat jauh menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadis. Anggapan bahwa negara Indonesia telah kalah dan menyerah kepada Belanda yang dianggap kurang mampu melindungi rakyat khususnya di daerah Jawa Barat. Konsep negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diusung oleh S.M. Kartosoewirjo sangat relevan jika diterapkan di Indonesia.

Keyword : NII dan Fikih *Siyasah Dusturiyah*.

A. Pendahuluan

Ketika sebuah negara merumuskan sebuah konsep dasar negara, itu merupakan isu sentral dalam sejarah pemikiran kenegaraan. Dalam negara kita ketika membahas dasar negara pada awal-awal perjuangan kemerdekaan, terdapat beberapa orang dari golongan Islam menawarkan Islam sebagai dasar negara. Pemikiran tentang ide dasar Negara Islam sebenarnya merefleksikan upaya pencarian fondasi intelektual bagi fungsi dan peran negara sebagai faktor instrumental untuk merealisasikan ajaran agama Islam. Pemikiran kenegaraan Islam merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem dan proses politik yang sedang berlangsung.¹

¹M. Din Syamsudin, *Usaha pencarian konsep negara dalam sejarah pemikiran Islam, dalam ulumul Qur'an vol iv no.2* (Jakarta: 1993),hlm.4.

Pada dasarnya, mendefinisikan islam terpisah dari ruang politik adalah sama timpangnya dengan mendefinisikan Islam mengajarkan politik secara lengkap. Meski demikian, umat islam pada umumnya mempercayai dimensi Islam sebagai sebuah agama yang universal. Islam seringkali dipandang sebagai lebih sekedar kepercayaan atau keyakinan, tetapi sebagai sebuah sistem seperti masyarakat madani,² peradaban yang lengkap, atau bahkan agama dan negara.³ Rumusan-rumusan tersebut dilandasi pandangan bahwa Islam mencakup lebihdari sekedar sistem teologi atau moral. Islam tidak mengakui tembok pemisah antara yang spiritual dan yang profane dan antara yang kekal dan yang temporal. Islam mengatur semua aspek kehidupan.⁴

Dalam pembahasan dasar negara di Indonesia terjadi perdebatan yang sangat panjang, polarisasi dari sebuah wacana dasar negara ini mengarah kepada lahirnya dua kubu yaitu, golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, hingga memanas didalam sidang BPUPKI pada tahun 1945 yang mana dalam sidang ini akan memutuskan apa yang menjadi dasar negara ini, hingga akhirnya diputuskan yang menjadi dasar negara adalah Pancasila bukan Islam. Kemudian dari sinilah golongan nasionalis Islam merasa termarginalkan oleh golongan nasionalis sekuler yang pada selanjutnya golongan nasionalis Islampun terpolarisasi pecah dalam menyikapi hasil keputusan sidang di BPUPKI. Polarisasi dalam golongan nasionalis Islam tersebut pada saat itu masih tetap dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, akan tetapi jalur yang ditempuh berbeda yaitu, ada yang mengambil jalur perjuangan parlementer seperti M Natsir dan juga ada yang mengambil jalan revolusioner, seperti S.M Kartosoewirjo.⁵

Sekarmaji Maridjan Kartosuwiryo atau lebih dikenal dengan sebutan S.M. Kartosoewirjo adalah seorang tokoh yang lebih akrab disebut pemberontak dan sangat erat kaitannya dengan Negara Islam Indonesia (NII). Buku-buku sejarah memosisikan S.M. Kartosoewirjo sebagai orang yang “bermimpi” mendirikan Negara Islam Indonesia dalam Negara

²Muhammad Iqbal, *The reconstruction of religious thought in islam* (Lahore: Muhammad Asraf,1962).hlm. 13.

³Thaha Abd al-Baqi Surur, *Daulah al-Qur'an* (Kairo:Dar al-nahdhal alMishr,1972)hlm.80

⁴M. Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: DDII dan Media Dakwah, 2000).hlm.5

⁵T.noor Cahyadi dengan judul “*Relasi Islam dan Negara (studi atas pemikiran kenegaraan M. Natsir dan S.M kartosoewirjo)* (Yogyakarta:2009)hlm.13 .

Republik Indonesia dan juga dalam sejarah politik nasional, nama S.M. Kartosoewirjo diidentikan dengan gambar kelam yang bernuansa mistis sehingga pandangan sebagian besar masyarakat Indonesiapun seperti itu. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia S.M. Kartosoewirjo tetap aktif di kancah politik nasional. Tetapi pasca penandatanganan perjanjian *Renville* pada tanggal 8 desember tahun 1947 sampai 17 januari 1948, yang menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat merugikan pihak Indonesia diantaranya:⁶

1. Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan belanda atas Hindia Belanda Indonesia sampai pada waktuya ditetapkan oleh kerajaan belanda untuk kedaulatan Negara Indonesia Serikat.
2. Diberbagai daerah Jawa, Madura dan Sumatra akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah daerah-daerah itu masuk RI atau masuk negara Indonesia serika.
3. Menyetujui gencatan senjata dan pengakuan “demarkasi van mook”
4. Tempat-tempat strategis yang semula diduduki pasukan-pasukan TNI (yang dikuasai tentara Belanda) harus dikosongkan, dan semua pasukan TNI tersebut harus ditarik mundur ke jawa tengah.

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik Indonesia harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, dari sinilah S.M. Kartosoewirjo berpendapat bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia telah kalah dan berakhir, yang kemudian diganti dengan Republik Indonesia serikat buatan belanda.

⁶Irfan S. awwas, *Trilogi kepemimpinan Negara Islam Indonesia; menguak perjuangan umat islam dan pengkhianatan kaum nasionalis-sekuler* oleh Irfan S. awwas. Cet.2 (Yogyakarta: USWAH. 2009)hlm. 166.

Karena situasi politik nasional yang seperti ini dan Republik Indonesiapun belum diakui oleh dunia luar. S.M. Kartosoewirjo tetap melawan Belanda dan kemudian karena kekosongan pemerintahan ini ia berjihad memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Baginya Islam mempunyai konsepsi negara yang sangat jelas. Islam adalah agama dan negara. Ia juga berpandangan bahwa untuk menegakkan hukum-hukum Allah dimuka bumi wajiblah ada kekuasaan yang menjaminkannya, kekuasaan itu adalah kekuasaan Islam dan pemerintah Islam, sedangkan tidak ada pemerintah Islam dalam sebuah negara Islam.⁷

Menurut ulama *fiqh siyāsah*, pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Akan tetapi, karena adat istiadat tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akibatnya, karena pemerintah memegang kekuasaan, tidak jarang pemerintah bersikap absolut dan otoriter terhadap rakyatnya. Hal-hal yang tidak disukai pemerintahpun harus diberantas atau disingkirkan agar kekuasaannya tetap aman. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan, bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemeritahan yang berkuasa tersebut. Namun demikian, gagasan tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia menjadi semakin termarginalkan baik oleh rezim orde lama maupun orde baru. Sangat ironi melihat kenyataan itu, karena Republik Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar didunia. Dari beberapa fakta diatas yang telah disebutkan itulah yang menjadi dasar keinginan penulis untuk mengadakan studi tentang pemikiran S.M. Kartosoewirjo tentang Negara Republik Indonesia.

B. Konsep Negara Menurut Pemikiran Kartosoewirjo

1. Biografi dan Pengalaman Politik Kartosoewirjo

SM. Kartosuwirjo sebuah nama gabungan dari namanya sendiri, ayah dan kakeknya. Nama aslinya adalah Sekarmadji, ayahnya Maridjan dan kakeknya Karto Suwirjo. Ayahnya seorang pegawai kraton dari kesultanan Solo. Seorang yang paham sejarah, pekerjaannya sebagai petugas pemeliharaan barang-barang sejarah termasuk buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang zaman dahulu. Dan memang masih ada hubungan darah kesultanan, baik dengan kesultanan Solo maupun Demak.

⁷S.M Kartosoewirjo, "*sedikit tentang oelil amri*" dalam fadjar asia, 24 mei 1930. Lihat Al Chaidar, *pemikiran politik* hlm. 515-516.

Sekarmaji Maridjan Kartosoewirjo begitu nama lengkap S.M. Kartosoewirjo. Ia dilahirkan di Cepu, pada Selasa Kliwon tanggal 07 Februari 1905.⁸

Cepu merupakan daerah kecil antara Blora dan Bojonegoro, atau sebuah daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga mempunyai akulturasi budaya antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ayah beliau yaitu Maridjan Kartosoewirjo pada masa itu jabatannya disamakan dengan Sekertaris Distrik. Oleh sebab itu ayahnya memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi pada saat itu. Kartosoewirjo memiliki kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada tahun 50-an dan kakak laki-laki yang memimpin Serikat Buruh Kereta Api pada tahun 20-an, ketika itu di Indonesia terbentuk berbagai Serikat Buruh.

Dengan melihat pekerjaan ayahnya, Ia bukanlah terlahir dari keluarga ulama (lingkungan agamis), namun demikian karena posisi inilah ayah Kartosoewirjo memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi pada saat itu. Status inilah yang berpengaruh sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya salah satunya dibuktikan dengan bisa bersekolah di sekolah Belanda. Ia sangat beruntung karena mendapat pendidikan yang formal yang mana pada saat itu jarang orang yang mendapatkannya. Keluarga Kartosoewirjo memang tergolong priayi feodal dan bukan pemeluk agama yang taat. Masa kecilnya pun tak akrab dengan pendidikan agama, Dia terus-menerus menempuh pendidikan di sekolah Belanda.

Pada tahun 1911, dalam usia 6 tahun Ia masuk sekolah angka II (tweede inlandsche school) atau sekolah rakyat, sekolah yang khusus diperuntukan bagi golongan pribumi di pamotan, desa tempat tinggal orang tuanya. Setelah menamatkan sekolah yang di kenal sebagai “sekolah ongko loro (angka dua)” pada tahun 1915, Ia melanjutkan ke sekolah HIS di Rembang, di sekolah ini diajarkan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa asing lainnya. Setelah itu dia meneruskan pendidikan ke Europeesche Lagere school, sekolah elite khusus anak Belanda di Bojonegoro, Jawa Timur.⁹

Di sekolah itu hanya orang pribumi yang cerdas dan berasal dari keluarga amtenar. Setelah lulus dari ELS, Kartosoewirjo pada tahun 1923 pergi ke Surabaya dan mulai kuliah pada sekolah

⁸Holk H. Dengel, *Kartosuwiryo Dan Darul Islam, Angan-Angan Yang Gagal* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 7.

⁹Tempo, *Kartosuwiryo, Mimpi Negara Islam* (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 2.

kedokteran NIAS (Nederlandsch Indische artsen school). Di tingkat tersebut dia mengikuti tingkat persiapan (Voorbereidende school) selama tiga tahun kemudian pada tahun 1926 dia memulai kuliah yang sebenarnya, tetapi setahun kemudian dia di dikeluarkan dari sekolah tersebut. Karena mempunyai buku-buku tentang sosialis komunis yang pada waktu itu telah terjadi pemberontakan-pemberontakan komunis akhir tahun 1926.

Di masa remajanya, S.M. kartosoewirjo mulai tertarik pada dunia pergerakan justru akrab dengan pemikiran kebangsaan, bahkan yang “kekirian”. Karena terpengaruh bacaan-bacaan yang diperoleh dari pamannya tentang sosialisme. Pamannya marko kartodikromo dikenal sebagai wartawan dan aktivis sarekat Islam beraliran merah. Kartosoewirjo mulai terjun ke dunia politik bergabung dengan jong java dan kemudian jong Islamieten bond.

Tentang pengetahuan Islamnya SM. Kartosuwiryo berbeda dengan tokoh-tokoh Islam lainnya yang mendapatkan pengetahuan tentang Islam melalui pendidikan pesantren/madrasah-madrasah. Maka beliau mendapatkannya dengan cara autodidak (belajar sendiri) dan sering berkonsultasi pribadi dengan ‘ulama-ulama’ yang konsekwen dan sholeh. Bermotivasi semangat Islam yang mengalir dalam dirinya yang ditanamkan orang tuanya semenjak kecil, beliau terus mempelajari dan mendalami Al Islam, melalui buku-buku yang ada pada saat itu. Kesibukan kuliahnya dalam bidang Ilmu Fisika yang cukup berat itu, tidak menghalangi dari usaha menggali Islam. Setelah dikeluarkannya dari NIAS, kesempatan mempelajari Al Islam semakin luas apalagi setelah tinggal dengan pak cokroaminoto, mulai tahun 1927-1929. Beliau juga banyak mewarisi sifat-sifat kepemimpinan Cokroaminoto, terutama dalam ketegasannya memegang prinsip kebenaran (*Al Haq*).

Pada tahun 1929 karena alasan kesehatan disamping tugas dari pimpinannya, terpaksa beliau harus berpisah dengan Cokroaminoto untuk pindah ke Jawa Barat. Kemudian bermukim di Malangbong, sebuah kota kecil dekat Garut dan Tasikmalaya. Disana beliau berguru pada ‘Ulama’ setempat antara lain Kyai Yusuf Tadjri dan Kyai Ardi Wisastro yang disebut belakangan ini disamping sebagaiguru juga merangkap sebagai mertuanya, sebab menikah dengan putrinya yang bernama Dwi Ummi Kalsum pada tahun 1929.

Kyai Ardi Wisastra adalah seorang Ulama yang termashur di daerah Malangbong, disamping sebagai tokoh PSII terkemuka di daerah itu beliau juga seorang sufhi, yang selalu berusaha membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa, dan meningkatkan martabat diri di hadapan Allah dengan melaksanakan amalan nawafil, disamping ibadah fardhu yang terbatas itu. Bidang inilah yang sangat menarik SM. Kartosuwiryo, untuk mempelajari lebih dalam, sebab menurut pendapatnya untuk menjadi mujahid (pejuang Islam) yang baik, mesti dibutuhkan kebersihan jiwa dari penyakit-penyakit *riya, 'ujub*, iri hati, syirik dan semacamnya. Bagaimana seseorang akan memperjuangkan berlakunya Islam untuk orang lain, sedangkan dirinya sendiri belum Islam secara konsekuen lahir dan bathin, apalagi untuk menjadi seorang pemimpin Islam harus mesti mempunyai sifat-sifat Warosatul Ambiya menjadi kekasih Allah (*Waliyullah*).

Dengan bimbingan mertua sekaligus gurunya, beliau melaksanakan praktek-praktek sufhi, mengkonsentrasikan jiwa hanya untuk berdzikir kepada Allah saja. Sementara hubungan dengan yang bersifat duniawi diputuskannya. Dengan maksud mencontoh perilaku Nabi Muhammad Rosullullah s.a.w. Menjelang menerima wahyu pertama, beliau selalu mengadakan *kholwat* (mengasingkan diri dari kehidupan duniawi), *tabattul* (membulatkan perhatian dan jiwa hanya untuk *Dzikerullah* semata), dan *taqorub* (mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah nawafil), sehingga aku mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya (membimbing pendengarannya dengan hidayah dan taufiknya), yang mana dia mendengar dengan-Nya dan aku menjadi tangannya, yang dia memeluk dengan-Nya, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan-Nya. Apabila dia meminta sesuatu kepadaKu, pasti aku akan memberinya, dan apabila dia meminta perlindungan pada-Ku, pasti aku akan melindunginya (Diriwayatkan Bukhori)

SM. Krtosuwiryo telah berusaha mengamalkan konsep ini dengan membangun Goa buatan, yaitu dengan menggali tanah untuk lubang. Disanalah beliau berkhilafat dan bertafakkur, mengasingkan diri dari kesibukan-kesibukan Duniawi, menjernihkan jiwa dari *rizail-rizail* (kotoran-kotoran dosa ma'siat). Selama beberapa hari beliau ber-*taqarub* dengan melaksanakan ibadah-ibadah fardhu dan nawafil. Allah SWT menepati janji-Nya dengan mencintai hamba-Nya yang ini, yang telah bermujahadah sekuat kemampuan, berjalan di atas fardhu dan nawafil,

menuju ridho-Nya. Akhirnya Allah menurunkan cahaya hidayahnya dan taufiq-Nya, yang membimbing dan menuntun pendengarannya, penglihatannya, kakinya, banyak diijabah do'anya dan beliau sering mendapat perlindungan Allah pada saat kritis, dari ancaman musuh-musuhnya, musuh Allah dan musuh Islam.

Kartosoewiryo mulai aktif di kancah politik pada saat ia bergabung dengan Jong Java. Organisasi ini pecah karena anggotanya yang lebih radikal memilih gerakan yang tidak terlalu mengagungkan tradisi Jawa dan pemikiran Barat. Mereka mendirikan Jong Islamieten Bond, yang lebih menyuarakan aspirasi Islam. Dan Kartosoewirjo ikut bergabung. Kartosoewirjo tidak pernah masuk pesantren, dia mempelajari Islam dari kiai-kiai secara serabutan kepada kiai yang dia temui. Sampai bertemu dengan H.O.S. Cokroaminoto dia menyatakan ingin menjadi muridnya hingga dia mondok dirumahnya. Disana dia berguru soal Islam dan politik.

Pada tahun 1929 “kursus” Ilmu politik dan Islam dirumah Tjokroaminoto selesai. Kartosoewirjo ditunjuk sebagai wakil partai Sarekat Islam Indonesia di Jawa Barat. Kartosoewirjo bekerja sama dengan Jepang dan mendirikan Masyumi, menolak segala perjanjian dengan Belanda. Lahir pada 7 Agustus 1945 Jepang merestui Masyumi dengan harapan kekuatan Islam dapat membantu dalam perang. Padahal para pendiri Masyumi seperti K.H. Wahid Hasyim, M. Natsir, Kartosoewirjo menginginkan organisasi ini dapat menghadirkan semangat Islam dalam perang kemerdekaan.

Sebelum terpilih sebagai komisaris Jawa Barat merangkap Sekretaris I Masyumi, dia sudah aktif dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), salah satu organisasi cikal bakal Masyumi. Atas usulan Kartosoewirjo pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta, Masyumi menjadi sebuah partai politik dan dia tetap menjadi sekretaris pertama. Programnya menciptakan negara hukum berdasarkan ajaran Islam. Dia juga mematangkan partai yang diharapkan menjadi wahana organisasi bagi semua kelompok Islam.

2. Negara Republik Indonesia di Mata Kartosoewirjo dan Konsep Negara Menurut Pemikiran Kartosoewirjo

Dalam buku manifesto politiknya, *Heru tjokro Bersabda: Indonesia kini dan kelak*, Kartosoewirjo menulis “Heru Tjokro” merupakan makhluk Allah yang suci, menguasai dan memutar roda dunia menuju *mardlotillah* sejati, yaitu Negara Islam Indonesia. Heru Tjokro juga diartikan sebagai :

“Penyapu Masyarakat Jahilliyah “. Pemerintah Soekarno dianggap kafir karena tidak menjalankan Syariat Islam, dianggap Jahilliah dan harus diperangi. Karto menganggap situasi Indonesia ketika itu sama dengan masa penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Sewaktu Rasul hijrah ke Madinah, maka golongan yang pertama kali menyambut berdirinya negara madinah adalah kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi dan Golongan lainnya.¹⁰

Di dalam realitas sosial politik, pluralisme merupakan pilihan pertama Rasul sebagai pondasi hidup bernegara. Pluralisme pertamakali di implementasikan Rasulullah periode pasca hijrah yang di tandai dengan penandatanganan piagam Madinah. Pada waktu Muhammad menghadapi perlawanan kaum Quraisy, Kartosoewirjo mengatakan menghadapi TNI. Dia juga membaaur agama dengan ritual kebatinan. Raden Oni Syahroni dan Kartosoewirjo bertemu dengan hati kecewa pada awal 1948, mereka membicarakan perjanjian renville, 17 januari 1948 yang mengharuskan tentara dan laskar bersenjata mundur kebelakang garis Van Mook. Wilayah yang berisi pasukan bersenjata harus dikosongkan. Ketika itu santer terdengar Divisi Siliwangi yang menjadi kebanggaan rakyat Jawa Barat akan hijrah ke Yogyakarta.

Pengalaman perjanjian Linggarjati yang tidak dipatuhi Belanda mengingatkan mereka untuk tidak mudah percaya kepada taktik penjajah. Dari situ mereka mengangap pemerintah dan TNI tidak hanya menunjukkan sikap kompromistis terhadap Belanda, tapi juga membiarkan rakyat Jawa Barat tak terlindungi. Sehingga Kartosoewirjo menganggap Indonesia telah runtuh, daerah kekuasaannya hanya tinggal Yogyakarta saja. Menurut penulis setelah era reformasi, Pancasila seperti menjadi trauma bagi masyarakat Indonesia. Ini dikarenakan begitu diagungagungkannya Pancasila di masa orde baru yang terlihat sangat sempurna yang kemudian berakhir dengan meninggalkan banyak terjadi penyimpanganpenyimpangan, KKN, Utang luar negeri, devifit negara, kebebasan press sangat dibatasi, dll.

Tjokroaminoto dan juga muridnya sudah sejak tahun 20-an memperjuangkan ide sebuah Negara Islam dan pengertian mereka atas sebuah Negara yang demikian itu adalah sebuah Negara yang benar-benar menjalankan Syari’at dan hokum Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur’an

¹⁰Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam*(Yogyakarta, Siyasat Press,2008).hm. 66.

dan sunah Nabi secara konsekuen dan menyeluruh.¹¹ Buku-buku dan artikel yang dikarang oleh para nasionalis Islam sebelum proklamasi, menunjukkan bahwa mereka sudah sejak dini memikirkan dan membahas bentuk dari Negara yang akan didirikan, namun tidak terdapat konsep yang dapat digunakan. Karangan-karangan tersebut lebih banyak halhal yang bersifat umum.¹²

Kartosoewiryo telah merealisasikan gambarannya tentang sebuah Negara Islam, ketika dia pada bulan Mei 1948 membentuk Dewan Imamah (Kabinet) yang dia pimpin sebagai imam dan dengan secara formal telah mendirikan Negara Islam. Undang-undang Dasar Negara Islam, yaitu kanun Azasi, konsepnya sudah selesai disusun pada bulan agustus 1948. Kanun azazi ini diawali oleh sebuah penjelasan singkat yang terdiri dari 10 pokok. Antara lain disebutkan, bahwa Negara Islam Indonesia tumbuh dimasa perang, ditengah-tengah revolusi nasional dan selama perang suci berjalan terus. Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dimasa perang. Perjuangan kemerdekaan dianggap sudah kandas.¹³

Menurut pasal 1 konstitusi Negara Islam Indonesia, Negara yang diproklamkan oleh Kartosoewirjo adalah sebuah Negara Republik (*Jumburiyah*). Dalam Republik ini menjamin berlakunya syariat Islam dan akan member keleluasaan bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ibadahnya. Dasar hokum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dan hokum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Instansi tertinggi adalah Majelis Syuro, tetapi dalam keadaan genting hak tersebut dapat dialihkan kepada Imam atau Dewan Imamah. Berdasarkan konstitusi ini, semua kekuasaan terpusat ditangan Imam yang harus seorang Indonesia asli dan beragama Islam, sesuai dengan itu semua kedudukan tinggi lainnya hanya boleh diduduki oleh orang Islam.¹⁴

Pada tanggal 7 Oktober 1949 keluar maklumat Komandemen Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia No. 1 (MKT-APNII

¹¹Menurut pengertian dalam Islam apa yang didirikan Nabi Muhammad di Madinah adalah Sebuah Negara. untuk ini lihat Z.A. Ahmad, Islam dan Konstitusi dalam: *Islam Berjoeang*, No.5,1957 hlm.37-49, N. Madjid, Cita-cita politik kita, dalam :Bosco Carvallo & Dasrizal(Ed) Apresiasi Umat Islam Indonesia. Jakarta: LEPPENAS 1983. Dikutip dari H.H. Dengel, *Darul Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1995)hlm. 111.

¹²Holk H. Dengel, *Darul Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1995)hlm. 111.

¹³*Ibid*,hlm.112.

¹⁴*Ibid*, hlm. 113.

NO.1) diberitahukan bahwa pimpinan sipil dan militer telah dipersatukan, karena cara demikian akan menjamin pemerintahan yang lebih efisien untuk sebuah negara yang sedang dalam berada dalam perang. Sejak saat itu kepentingan negara harus di militerkan termasuk ahli politik dan ahli militerpun harus diper-politikan. Reorganisasi negara buatan kartosoewirjo membawa penyederhanaan sistem administrasi secara menyeluruh, yang kini hanya terdiri dai 5 Komandemen. Skema reorganisasi negara buatan kartosoewirjo menurut MKT-APNII No. 1 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Imamah (kabinet) dibawah imam diubah menjadi : Komandemen Tertinggi (KT) dibawah pimpinan Panglima Tertinggi pimpinan harian dilakukan oleh kepala staf umum (KSU).
2. Divisi dan wilayah yang dipimpin oleh komandan divisi dan gubernur diubah menjadi: komandemen Wilayah (KW) dibawah pimpinan panglima komandemen wilayah(Plm.KW) pimpinan harian dilakukan oleh kepala staf komandemen wilayah(KSW).
3. Resimen dan Karesidenan yang dipimpin oleh seorang komandan Resimen dan seorang residen diubah menjadi: komandemen daerah (KD). Dalam daerah yang demikian pimpinan militer dan politik berada ditangan komandan komandemen daerah. Pimpinan harian dilakukan oleh kepala staf komandemen daerah.
4. Batalyon dan kabupaten yang dipimpin oleh seorang komandan batalyon dan seorang bupati diubah menjadi: komandemen kabupaten (KK) disini pimpinan militer dan politik dipegang oleh komandan komandemen kabupaten (Kmd KK). Pimpinan harian dilakukan oleh seorang kepala staf komandemen kabupaten (KSKK).
5. PADI dan kecamatan yang dipimpin oleh seorang komandan PADI dan seorang Camat diubah menjadi:
6. Komandemen kecamatan (K.Kt). Disini pimpinan militer dan politik dipegang oleh komandan komandemen kecamatan (kmd.K.Kt). Pimpinan harian dilakukan oleh seorang kepala staf komandemen kecamatan (KSKKT).

Kelima wilayah administrasi ini masing-masing berhak untuk mendapatkan 20% dari pendapatan negara. Selain itu PADI dilebur

kedalam Tentara Islam Indonesia (TII), Badan Keamanan Negara (BKN) diubah namanya menjadi Polisi Islam Indonesia (POLISI) dan Gestapo serta kesatuan-kesatuan istimewa lainnya digabungkan kedalam masing-masing komandan wilayah.

Di dalam memperjuangkan ide tentang negara Islamnya, Kartosoewirjo mengartikan sebuah agama secara politis. Nilai-nilai didalam agama terlihat sangat konkrit karena tafsiran dan terjemahannya sederhana, sungguh sangat luarbiasa pada saat perang masih berlangsung dan situasi politik yang tidak menentu, ternyata Kartosoewirjo telah menyusun konsep-konsep yang matang tentang halhal yang menyangkut pengaturan pemerintah, tentara, demokrasi dalam lembaga legislatif dan hal-hal lainnya seperti Bai'at dan Sumpah prajurit. Struktur kekuasaan Darul Islam terlihat dalam Qanun Asasi, dalam sistem kukuasaanya Darul Islam menggabungkan antara elemen sipil dan militer sekaligus dalam satu komandemen. Kepentingan NII ketika itu juga disesuaikan dengan keadaan politik ketika itu.¹⁵

Dalam pandangan Khozin pemikiran politik Kartosoewirjo tentang bentuk negara dan pemerintahan sejalan dengan pemikiran modern yang menyatakan bahwa bentuk negara dan sistem pemerintahan Islam tidak harus mengacu pada sistem tertentu. Islam menurut Kartosoewirjo tidak menentukan rezim tertentu dan juga tidak mengharuskan untuk menganut sistem tertentu dalam mengatur dan menata negara, termasuk sistem khilafah, oleh karena itu manusia mempunyai kebebasan untuk menata dan mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kenegaraan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, kemampuan intelektual yang mereka miliki dengan mempertimbangkan perkembangan sosoail dan kebutuhan zaman.¹⁶

Walaupun Kartosoewirjo memandang Islam sebagai agama yang sempurna, namun menurutnya tidak semua persoalan hidup manusia telah diatur secara rinci dan detail dalam Islam. Sehingga dalam menata dan mengatur negara umat Islam diberikan kebebasan untuk melakukan ijtihad dalam menentukan pilihan merekayang terbaik asalakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hukumhukum yang telah ditentukan dalam Islam.

¹⁵Al-Chaidar, Sepak terjang KW 9, hlm. 15.

¹⁶Khozin, Konsep Negara Menurut Kartosoewirjo,(yogyakarta:skripsi,1999), hlm.117.

Dalam konteks seperti ini, maka prinsip syariat yang penting harus diikuti dan dihormati menurut Kartosoewirjo adalah prinsip Syura yang dewasa ini disebut dengan demokrasi. Dalam hal demokrasi Kartosoewirjo cenderung menganut demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat karena dalam kedaulatan rakyat ia menjelaskan bahwa hukum dan undang-undang di buat oleh rakyat, pemerintah di pilih oleh rakyat dan pemerintahannya di lakukan untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pemerintah. Kebijakan-kebijakan ditentukan oleh suara mayoritas rakyat yang di wadahi dalam lembaga majelis Syura(parlemen), termasuk penentuan siapa yang berhak menjadi kepala negara.

Namun demikian demokrasi dalam Islam menurutnya tidaklah berarti semua persoalan diserahkan penyelesaiannya pada rakyat, karena permusyawaratan hanya dilakukan pada masalah-masalah yang belum ditentukan hukumnya. Karena pandangan Kartosoewirjo tentang demokrasi, harus pula dipandang dalam konteks negara idealnya. Dimana negara Islamnya merupakan negara yang berdasarkan aturan Islam dengan Al-Qur'an dan sunnah sah sebagai hukum tertinggi. Penerimaan kartosoewirjo terhadap Demokrasi Barat, dimana kedaulatan rakyat dengan suara mayoritas suara terbanyak sebagai penentu kebijakan hanyalah penerimaan secara teknis kelembagaan. Walau mengakui Demokrasi Barat dengan kedaulatan rakyatnya, tetap saja hal ini tidak saja terlepas dari hukum-hukum tertingginya yaitu Al-Qur'an dan sunnah, artinya halitu tetap terikat dan berlandaskan keduanya. Dengan demikian akan sama hasilnya bahwa demokrasi tetap harus berpegang pada hukum-hukum Allah.

Dengan demikian disini akan terlihat menurut pandangannya bahwa suatu negara berlandaskan Islam bukanlah negara Teokrasi yang menetapkan dan menjalankan kekuasaan negara atas nama Tuhan. Sebaliknya negara Islam bukanlah negara sekuler yang ditegakan berdasarkan pertimbangan akal semata tanpa mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Bentuk negara yang paling relevan dalam ajaran Islam menurut Kartosoewirjo adalah demokrasi, sedangkan mekanisme demokrasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, pandangan ini memiliki legitimasi dari AlQur'an juga di topang fakta historis perjalanan politik Islam terutama periode Nabi dan Khulafa al-Rasyidin.

Mengenai pancasila Kartosoewirjo cenderung tidak bisa bersikap realistis, dengan tegas menolak Pancasila sebagai sebuah dasar Negara.

Kartosoewirjo menyatakan bahwa Pancasila adalah Jahiliyah bentuk baru, dimana ia telah menjadi berhala yang disembah di Indonesia. Pancasila merupakan satu campuran dari berbagai paham, Shintoisme Jepang, Animisme Indonesia, *Hokkoitju* atau teori kemakmuran Asia Timur Raya dan Nasionalisme Indonesia jahil yang Kemerah-merahan (Komunisme).¹⁷

Pancasila bagi Kartosoewirjo tidak memiliki akar kedalaman sehingga ia tidak mampu berdiri secara layak dalam istilah “bergantung tak bertali, berdiri tak berakar”. Ini disandarkan atas kenyataan sosiologis bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, suatu hal yang ironis jika kehendak mayoritas diabaikan. Dengan alasan-alasan itulah Kartosoewirjo menolak Pancasila dalam bentuk apapun.

Sejalan dengan Kasman Singodimejo, salah seorang wakil dari Masyumi juga menjelaskan tentang beberapa aspek dari ajaran Islam yang menjadi latar belakang mengapa Islam harus diperjuangkan sebagai dasar dan Ideologi Negara Republik Indonesia, di antara penjelasannya adalah pertama, Islam adalah ajaran universal dan *rahmat li al-'alamin* yang berasal dari Allah, tetapi Islam juga sangat menghargai akal intelektual atau kecerdasan. Kedua, Islam mewajibkan demokrasi berdasarkan musyawarah yang menyerukan kebenaran hakiki, tetapi Islam mewajibkan pemimpin rakyat dan pemimpin negara agar bertanggung jawab terhadap rakyat dan terhadap Tuhan. Ketiga, Islam menegakan kemerdekaan lahir dan batin, menolak penjajahan, penindasan dalam bentuk apapun, dan sebagai aktualisasinya Islam memberantas kemelaratan, sebaliknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin atas dasar hidup keberagaman antar golongan dan kelas. Keempat, didalam ketentuan hukumnya, Islam mewajibkan menunaikan kewajiban kolektif dan kewajiban individu, sehingga tidak boleh adanya sikap egoisme. Kelima, Islam memberikan penilaian yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan dengan tidak mengurangi kenyataan, bahwa perbedaan sifat dan bakat antara perempuan dan laki-laki membawa pula pembagian tugas dan lapangan pekerjaan bagi masing-masing jenis kelamin.¹⁸

¹⁷Khozin, Konsep negara Indonesia menurut S.M. Kartosoewirjo, (Yogyakarta: UIN, 1999) hlm. 121.

¹⁸Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam* (Yogyakarta, Siyasat Press, 2008). hlm. 62.

C. Analisis Pemikiran Kartosoewirjo terhadap Negara Republik Indonesia.

Tidak begitu mudah mengetahui dengan pasti kapan S.M. Kartosoewirjo mulai mempunyai gagasan untuk mendirikan “ Negara Islam Indonesia”. Berbagai sumber mengatakan bahwa ia mempunyai ide dan gagasan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia sejak ia menjadi anggota PSII, yaitu sekitar tahun 1929. Dalam hubungannya dengan Islam, Kartosoewirjo menjelaskan bahwa umat Islam memiliki sebuah ideologi, yaitu Ideologi Islam. Menurutnya ideologi Islam berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya. Dimana ideologi Islam tidak hanya menuju kepada keselamatan dunia saja melainkan juga keselamatan dunia akhirat.¹⁹

Dari konsepsi ideologi inilah dia menolak ideologi lain. Dengan demikian kartosoewirjo menolak Sekulerisme. Menurutnya paham sekularisme merupakan paham yang berbahaya. Dalam Islam tidaklah mengenal pemisahan antara agama dan negara, dunia dan akhirat, lahir dan batin, masjid dan kantor. Baginya Islam menentukan pasti dasar-dasar hidup dan kehidupan. Paham sekuler inilah yang telah menyebabkan umat Islam jatuh, dimana umat Islam mulai meninggalkan ketentuan-ketentuan agamanya, serta tidak melaksanakan amal perbuatan yang sesuai dengan hukumhukum Allah, karena anggapan bahwa agama merupakan urusan hati dan tidak memiliki aturan-aturan tertentu bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰ Oleh karenanya kartosoewirjo mengajak kepada seluruh umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur’an dan sunah Rasul, dan melaksanakan hukum-hukum Allah, hukum Islam dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya. Karena menurutnya umat Islam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul dengan sungguh-sungguh niscaya akan mendapat kebahagiaan dan keluhuran derajat di dunia dan akhirat.

Sementara itu pandangan kartosoewirjo terhadap pancasila perlu di cermati juga, dimana Ia begitu pula dengan para pemimpin Islam Indonesia lainnya memandang bahwa pancasila merupakan produk sekuler dan jauh dari hukum-hukum Allah. Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah produk jahliyah bentuk baru, dimana ia telah menjadi berhala yang disembah bangsa Indonesia. Selain itu Ia juga memandang bahwa dalam

¹⁹Holk H. Dengel, *Darul Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1995)hlm. 111.

²⁰S.M. Kartosoewirjo, *broesoer sikap hidjab PSII.2(Malangbong: Majelis tabkim party sjarikat Islam Indonesia, 1936*, dikutip dari skripsi Khoizun hlm 78.

kenyataannya negara pancasila tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik, bahkan tak jarang membuang jauh-jauh. Oleh karenanya ia menegaskan bahwa tidak mungkin hukum-hukum Allah akan berjalan dengan baik dalam negara yang bukan Islam, baik itu negara Komunis, Sosialis maupun negara pancasila. Hukum-hukum Allah hanya akan berjalan secara baik dalam sebuah negara Islam.

Sekalipun penduduk Indonesia mayoritas agama Islam, bahkan yang terbesar didunia, akan tetapi sebagian besar penduduknya tidak menganut ajaran Islam yang sesungguhnya. Kondisi ini memunculkan istilah “Islam keIndonesiaan”. Kaum muslimin yang berada di Jawa dan kurang mendalami Islam lebih dikenal dengan istilah “Abangan”. Sedangkan yang berada diluar daerah lain keadaannya sama saja, mereka beragama Islam tetapi kebanyakan tidak berjiwa Islam. Praktik syirik dan mengesampingkan syariat Islam pada era kerajaan dahulu, diperparah dengan masuknya para penjajah kulit merah. Dengan semboyan *glod, glory and Gospel*-nya para penjajah ini mensponsori masuknya gerakan Freemasonry. Freemasonry adalah nama baru gerakan rahasia bentukan sembilan orang yahudi di Palestina pada tahun 37 M. Yang mendaulatkan dirinya sebagai lawan bagi agama masehi dan Islam. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kiprah penjajah Belanda.

Belanda pada awal penjajahannya, berusaha melumpuhkan Islam dengan cara-cara yang ditempuh Freemasonry. Buku-buku yang harus dan boleh diajarkan kepada anak didik juga menjadi kebijakan mereka. Sedangkan buku-buku yang dapat membangkitkan perlawanan dan semangat jihad kaum muslimin, menjadi bacaan yang dilarang. Bukan hanya itu hal-hal apa saja yang berbau Islam juga dibatasi.

Setelah masa penjajahan fisik dan materiil berakhir oleh belanda kini berganti menjadi penjajahan ideologi dan pemikiran yang dibawa oleh orang Indonesia sendiri, yang belajar di negeri penjajah tersebut. Ironis, melihat bangsa yang mayoritas Islam namun terjajah dinegeri sendiri yang pemikirannya menganut barat yang lebih parah lagi mereka juga mengaku agama Islam. Dilihat dari semua aspek, dari segi Politik, ekonomi dan hukumnya Indonesia banyak mengadopsi produk barat atau sering di kenal dengan warisan kolonial. Dalam menyelesaikan masalah hukum, pemerintah Soekarno hingga kini masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana(KUHAP), Undang-Undang (UU) yang hampir semuanya adalah buatan manusia yang jauh dari Syari'at Islam.

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik Indonesia harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillillah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda.

Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, dari sinilah S.M. Kartosoewirjo berpendapat bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia telah kalah dan berakhir, yang kemudian diganti dengan Republik Indonesia serikat buatan belanda. Karena situasi politik nasional yang seperti ini dan Republik Indonesia pun belum diakui oleh dunia luar. S.M. Kartosoewirjo tetap melawan Belanda dan kemudian karena kekosongan pemerintahan ini ia berijtihad memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Setelah memproklamasikan kemerdekaan Negara Islam Indonesia, Ia semakin konsisten dan teguh pendirian tanpa mengenal kompromi dengan Belanda. Hampir semua perundingan-perundingan dengan belanda ia menolak, bahkan dengan pemerintah Indonesia yang menganut ideologi pancasila pun ia sering melawan. Baginya pula pancasila adalah berhala baru bagi rakyat Indonesia yang pada hakekatnya harus di tentang dan kembali kepada kemurnia Al-Qur'an dan Hadis.

Baginya Islam mempunyai konsepsi negara yang sangat jelas. Islam adalah agama dan negara. Ia juga berpandangan bahwa untuk menegakkan hukum-hukum Allah dimuka bumi wajiblah ada kekuasaan yang menjaminnya, kekuasaan itu adalah kekuasaan Islam dan pemerintah Islam, sedangkan tidak ada pemerintah Islam dalam sebuah negara Islam. Salah satu alasan ini pulalah ia mendirikan Negara Islam Indonesia.

D. Relevansi Pemikiran Kartosoewirjo tentang Konsep Negara, Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pancasila adalah Ideologi Negara Republik Indonesia yang menjadi harga mati hingga saat sekarang. Menjadikan pancasila sebagai ideologi

negara Indonesia adalah salah satu upaya dari pejuang Indonesia untuk dapat mensejahterakan bangsa Indonesia. Namun cita-cita tersebut boleh dikatakan hanya sebatas wacana saja, dapat dibuktikan melalui fenomena yang terjadi di lapangan, semenjak negara Indonesia mengakui eksistensinya sebagai negara yang berdaulat hingga sekarang pembuatan undang-undang saja belum mampu membuat undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia sendiri. Undang undang serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat.

Dari persoalan di atas menjadikan negara Indonesia tidak mampu bersaing dengan negara-negara asing. Padahal sesungguhnya, konsep yang perlu untuk diubah cukup sederhana, hanya berkaca kepada sistem pemerintahan pada masa Rasulullah dan masa Daulah Islamiyah, di mana pada masa Rasulullah, beliau membentuk negara di Madinah tetap mempertahankan unsur pluralisme baik pluralisme politik maupun pluralisme keyakinan, pluralisme merupakan pilihan pertama Rasul sebagai pondasi hidup bernegara.⁴ dan masa Daulah Islamiyah merupakan suatu momen masa kejayaan dan keemasan yang sampai sekarang masih tercatat dalam sejarah.

Dengan demikian, untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang bermartabat, maju dan kompetitif dalam segala sektor kehidupan maka negara Indonesia perlu mengubah sistem seperti yang pernah diterapkan oleh Rasulullah setelah beliau hijrah dari mekkah ke madinah. Kartosoewirjo menyebutkan bahwa Islam adalah sebuah agama dan negara, Dalam Islam tidaklah mengenal pemisahan antara agama dan negara, dunia dan akhirat, lahir dan batin, masjid dan kantor. Baginya Islam menentukan pasti dasar-dasar hidup dan kehidupan. Semuanya saling berkaitan erat, tidak ada pembeda antara keduanya.

Sedangkan, di dalam fikih *Siyasah Dusturiyah* konsep negara mempunyai arti bahwa hubungan pemimpin disatu pihak dengan rakyat dipihak yang lain serta dengan kelembagaan-kelembagaan negara yang ada didalam masyarakat. Karena cakupannya yang sangat luas maka Fikih *Siyasah Dusturiyah* ini hanya dibatasi dengan pengaturan perundang-undangan hal ihwal tentang kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan serta yang memenuhi kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhannya.

Untuk mencapai kemaslahatan ada beberapa cara yang digunakan, salah satunya adalah sebagai berikut: *pertama*, adanya imam sebagai

pemimpin dan pemegang kekuasaan, adanya rakyat sebagai peran pembantu dalam pelaksanaan program-programnya, kemudian adanya pembai'atan atau pengakuan menaati dan mematuhi Imam, adanya perwakilan rakyat yang benar-benar membela kepentingan rakyat, adanya lembaga lembaga yang berwenang sehingga memudahkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada., serta adanyamenteri menteri pembantu Imam agar dalam melaksanakan tugasnya lebih mudah dan tertata.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa konsep negara menurut pemikiran kartosoewirjo sangat relevan dengan negara Indonesia, karena negara Indonesia yang multi etnis dan multi agama sama halnya di Negara Madinah zaman Rasul yang bisa diterapkan untuk merangkul semua kalangan demi kemaslahatan umat. Dilihat dari sejarah, Keikhlasan para Syuhada atau pejuang Islam yang gigih dengan mempertaruhkan harta benda, pikiran hingga nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan sejak jaman Belanda dan jaman Jepang. Harusnya mendapat apresiasi lebih karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Indonesia adalah negara dengan kaum mayoritas muslim bahkan penduduk muslim terbesar didunia sehingga jika ideologi Islam menjadi sebuah konsep negara maka sebetulnya sangat patut, sebagai contoh masyarakat Indonesia dapat menerima eksistensi ormas Islam, sekolah Islam, ekonomi Islam, bank Islam, seni budaya Islam, dan lain lain. Tetapi mengapa dahulu kaum nasionalis sekuler menolak eksistensi negara Islam?

Konsep Negara Islam Indonesia buatan Kartosoewirjo sesungguhnya sudah sesuai dengan ajaran Islam dimana mengacu pada teori fikih *Siyasah Dusturiyah*, dan bentuk negara dan sistem pemerintahan memiliki kesamaan dalam menyikapi hal-hal yang ada dalam kenegaraan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Dari berbagai data dan hal-hal yang disebutkan diatas sikap penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah setuju jika negara Islam Indonesia diterapkan di Indonesia.

E. Penutup

Dari pembahasan tentang pemikiran S.M. Kartosoewirjo terhadap negara republik Indonesia, kiranya dapat ditarik kesimpulan penting yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam tulisan ini diantaranya adalah: *Pertama*, Alasan penolakan S.M kartosoewirjo terhadap negara Republik

Indonesia adalah ideologi Islam yang lebih sempurna dari pada ideologi pancasila, pemikiran S.M Kartosoewirjo yang anti kolonialisme dan anti pemikiran barat karena orang-orang barat sangat jauh menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadis. Dan anggapan bahwa negara republik Indonesia dengan Presiden Soekarno telah kalah dan menyerah kepada Belanda sehingga dianggap kurang mampu melindungi rakyat. *Kedua*, Konsep Negara Islam seperti halnya dengan konsep pemikiran S.M Kartosoewirjo tentang NII relevan untuk diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Al-Maududi, Tadwin Al-Dustur al-Islami, Darul Fiqri, tt.
Ahmad, Muntaz, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, alih bahasa Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
- Ahmad, Mumtaz, *Masalah-Masalah Teory Politik*, Bandung: mizan, 1993.
- Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Plokamator Negara Islam Indonesia, S.M. Kartosoewirjo* Jakarta : darul Fallah, 1999.
- Anshori, A Yani, *Tafsir Negara Islam*, Yogyakarta: Siyasat Press, 2008.
- Bambang pranowo, "*Islam dan Pancasila : Dinamika Politik Islam di Indonesia*" dalam Ulumul Qur'an.
- Basyir, A Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1993.
- Budiman, Arif, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Djazuli, H. A., *fiqh siyasah*, Jakarta :Kencana 2003.
- Fahmi Amrusyi, *Otonomi dalam Negara Kesatuan (Beberapa Pemikir tentang Otonomi Daerah)*, Jakarta : Media Sarana Press, 1987
- Hadikusumo, Ki Bagus, *Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*, Yogyakarta: Pustaka Rahayu, tt
- Holk Dengel , *Kartosuwiryo dan Darul Islam, Angan-Angan yang Gagal*, Jakarta: pustaka sinar harapan, 1995.
- Huda, Nikmatul, *Ilmu negara* , Jakarta :Rajawali pers, 2012

- Irfan S. Anwar, *Trilogi kepemimpinan Negara islam Indonesia*, Yogyakarta, USWAH,2008.
- Isjwara, Fred, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung : Binacipta, 1974.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara, Prespektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesia tera, 2001.
- Khamani Zada, *Islam radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), cet.I
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: benteng budaya,1995.
- Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu negara*, Jakarta : Gaya Media Pratama,1995.
- Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.X (jakarta: Gramedia,1999)
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mubarak, Muhammad al-, *System Pemerintahan Dalam Prespektif Islam*, alih bahasa Firman Harianto, Jakarta : C.V. oustaka mantiq,1995.
- Muhammad Syafieq Ghorbal, *Al-Mansu'ah Al-Arabiyah Al-Muyassaroh*,Darul Qalam Al-Qahiroh,1965.
- Nasution, Dr. Harun, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran* , Jakarta : Mizan, 2000.
- Noor, Deliar, *Pemikiran Politik Barat*, Bandung: Mizan,1998.
- Olaf Schumman, *Dilema Islam Kontemporer Antara Masyarakat Madani Dan Negara Islam*, dalam Paramadina vol.I, no. 2(1999),
- Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, alih bahasa Safri Halim, Jakarta : Robbani press,1997.
- Suseno, Franz M, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1990)
- Suyono HW, *Penumpasan Pemberontakan DI Tentara Islam/ SMK di Jawa Barat*. Dinas sejarah TNI AD. 1974.

Syadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: UI press,1990.

Syafrudin, Amak, *Kartosoewirjo dan Menyerahnya*, Surabaya: Grip, 1962.

Syamsudin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos,2000.